



BAHAN AJAR (HANJAR) KARAKTER KEBANGSAAN (IDEOLOGI PANCASILA)

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

2021

IDENTITAS BUKU

KARAKTER KEBANGSAAN (IDEOLOGI PANCASILA)

Penyusun:

Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2021

Editor:

1. Kombes Pol Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H.
2. Bapak Aris Heru Utomo, S.H., MBA., M.Si.
3. AKBP Henny Wuryandari, S.H.
4. Kompol Prayitno, S.H.
5. Ipda Anugerah Bintang Pratama, S.T.

Hanjar Pendidikan Polri
Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan
Biro Kurikulum
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemndiklat Polri.

DAFTAR ISI

Cover	i
Sambutan Kalemndiklat Polri	ii
Keputusan Kalemndiklat Polri	iv
Lembar Identitas Buku	vi
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1
Standar Kompetensi	2
MODUL 01 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI	
Pengantar	3
Kompetensi Dasar	3
Materi Pelajaran	3
Metode Pembelajaran	4
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar	4
Kegiatan Pembelajaran	5
Tagihan/Tugas	5
Lembar Kegiatan	6
Bahan Bacaan	6
1. Pengertian Ideologi	6
2. Karakteristik dan Makna Ideologi Bagi Negara	7
3. Fungsi Ideologi	9
4. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka	11
Rangkuman	14
Latihan	15
KARAKTER KEBANGSAAN (IDEOLOGI PANCASILA) PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI	vii

MODUL 02 HAKIKAT PANCASILA

Pengantar	16
Kompetensi Dasar	16
Materi Pelajaran	16
Metode Pembelajaran	17
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar	17
Kegiatan Pembelajaran	18
Tagihan/Tugas	19
Lembar Kegiatan	19
Bahan Bacaan	19
1. Makna Pancasila sebagai Dasar dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia	19
2. Sejarah Pancasila	25
3. Kedudukan Pancasila	30
4. Fungsi dan Peranan Pancasila	33
5. Pentingnya Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara	34
Rangkuman	40
Latihan	42

MODUL 03 PANCASILA DAN JATI DIRI BANGSA

Pengantar	43
Kompetensi Dasar	43
Materi Pelajaran	43
Metode Pembelajaran	44
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar	44

	Kegiatan Pembelajaran	45
	Tagihan/Tugas	46
	Lembar Kegiatan	46
	Bahan Bacaan	47
	1. Pengertian Jati Diri Bangsa	47
	2. Jati Diri Bangsa Indonesia	50
	3. Sumber Jati Diri Bangsa Indonesia	52
	Rangkuman	57
	Latihan	58
MODUL	04 PENERAPAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA	
	Pengantar	59
	Kompetensi Dasar	59
	Materi Pelajaran	60
	Metode Pembelajaran	60
	Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar	61
	Kegiatan Pembelajaran	61
	Tagihan/Tugas	62
	Lembar Kegiatan	62
	Bahan Bacaan	63
	1. Jiwa Jati Diri Bangsa Indonesia	63
	2. Makna Sila-Sila dalam Pancasila	64
	Rangkuman	66
	Latihan	66


HANJAR**IDEOLOGI PANCASILA****8 JP (360 menit)****PENDAHULUAN**

Pancasila merupakan Ideologi Negara Republik Indonesia, ditetapkan sebagai dasar Negara Republik Indonesia terdiri dari 5 (lima) sila yang tidak terpisahkan. Di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan inti Pancasila dan dijabarkan dalam batang tubuh UUD tahun 1945.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai dasar yang bersifat fundamental, sistematis dan holistik. Sila per sila yang tersusun adalah satu kesatuan yang bulat, utuh dan hirarkis. Atas dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila bahwa Pancasila sebagai Filsafat bangsa dan negara mengandung arti dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, masyarakat dan kenegaraan yang berdasarkan kepada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Tantangan tugas Polri yang semakin berat dan kompleks harus mampu senantiasa meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga Polri terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk siap menghadapi tugas dilapangan. Oleh karena itu Lemdiklat Polri dalam (menyelenggarakan pendidikan) menyiapkan anggota Polri yang siap pakai perlu memberikan materi ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan wawasan kebangsaan yang dapat dipahami, dihayati dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sebagai keteladanan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga Polri dapat dicintai oleh masyarakat.

Untuk memberikan pemahaman dan penerapan tentang Ideologi Pancasila, maka dalam bahan ajar ini akan membahas materi yang meliputi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, hakikat Pancasila, Pancasila dan Jati diri bangsa, Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

	Standar Kompetensi
	<p>Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.</p>

MODUL

01

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI



2 JP (90 Menit)



PENGANTAR

Dalam Hanjar ini dibahas materi tentang Pancasila sebagai ideologi yang meliputi pengertian yang berkaitan ideologi, karakteristik dan makna ideologi bagi negara, fungsi ideologi, perbandingan ideologi dan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami Pancasila sebagai ideologi.



KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami Pancasila sebagai ideologi.

Indikator Hasil Belajar:

1. Menjelaskan pengertian ideologi;
2. Menjelaskan karakteristik dan makna ideologi bagi negara;
3. Menjelaskan fungsi ideologi;
4. Menjelaskan pancasila sebagai ideologi terbuka.




MATERI PELAJARAN


Pokok Bahasan:

Pancasila sebagai ideologi.


Subpokok Bahasan:


1. Pengertian ideologi;
2. Karakteristik dan makna ideologi bagi negara;
3. Fungsi ideologi;
4. Pancasila sebagai ideologi terbuka.

	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi. 2. Metode <i>Brainstroming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan. 3. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan pendidik untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode Penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang diberikan. 5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.

	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>White board</i>. b. <i>Laptop</i>/komputer. c. Papan <i>flipchart</i>. d. OHP/LCD. e. <i>Laserpoint</i>; f. Pengeras suara/<i>Sound System</i>. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>Flipchart</i>; b. Alat tulis. 3. Sumber Belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Konsep Ideologi (<i>The Concept of Ideology</i>), karangan Jorge Larrin, Agustus 1996; b. https://www.id.m.wikipedia.org : Pancasila sebagai ideologi

	terbuka (arti, syarat, ciri, dimensi, sejarah).
--	---

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Awal : 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik melakukan <i>overview</i> (penyampaian materi kembali secara singkat) materi sebelumnya. b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Tahap Inti : 70 Menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi Pancasila sebagai ideologi; b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; c. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi; d. Peserta didik bertanya tentang materi yang belum dimengerti/dipahami; e. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 3. Tahap Akhir: 10 Menit <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum terkait dengan kegiatan pembelajaran. b. Cek penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas lapangan.

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.

**LEMBAR KEGIATAN**

Pendidik menugaskan peserta didik meresmikan materi yang telah diberikan.

**BAHAN BACAAN****PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI****1. Pengertian Ideologi**

Istilah ideologi berasal dari kata *Idea* dan *Logos*. *Idea* berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Kata *idea* berasal dari bahasa Yunani, *Eidos* yang berarti bentuk atau *idein* yang berarti melihat. *Idea* dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan, atau faham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan *logos* berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (*The Science Of Ideas*), atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar.

Istilah “ideologi” pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf Perancis, *Antoine Destutt De Tracy* pada tahun 1796 sewaktu Revolusi Perancis tengah menggelora (*Christenson, et.al., 1971: 3*). *Tracy* menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat, dan perkembangan ide-ide manusia, atau yang sudah dikenal sebagai “*Science Of Ideas*”. Gagasan ini diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Namun, Napoleon mencemoohnya sebagai suatu khayalan yang tidak memiliki nilai praktis. Pemikiran *Tracy* ini sebenarnya mirip dengan impian *Leibnitz* yang disebut *One Great System Truth* (Pranarka, 1987).

Pokok-pokok pikiran yang perlu dikemukakan mengenai ideologi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa ideologi merupakan sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Kecuali itu, ideologi merupakan serangkaian pemikiran yang berkaitan dengan

	<p>tertib sosial dan politik yang ada dan berupaya untuk merubah atau mempertahankan tertib sosial dan politik yang bersangkutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Bahwa ideologi, di samping mengemukakan program juga menyertakan strategi guna merealisasikannya; c. Bahwa ideologi dapat dipandang sebagai serangkaian pemikiran yang dapat mempersatukan manusia, kelompok, atau masyarakat, yang selanjutnya diarahkan pada terwujudnya partisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial politik; d. Bahwa yang bisa merubah suatu pemikiran menjadi ideologi adalah fungsi pemikiran itu dalam berbagai lembaga politik dan kemasya-rakatan. <p>2. Karakteristik dan Makna Ideologi Bagi Negara</p> <p>Dalam memahami ideologi dan ideologi politik tidaklah cukup hanya melihat dari sosok pengertiannya, atau hanya berangkat dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahlinya. Oleh karena itu, meskipun secara elementer akan dipaparkan beberapa karakteristik ideologi sehingga upaya memahami makna suatu ideologi dapat dilakukan lebih mudah. Makna suatu ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya. Beberapa karakteristik suatu ideologi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. <p>Krisis di mana cara pandang, cara berpikir dan cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai suatu yang sudah tidak dapat diterima lagi. Keadaan semacam biasanya akan mendorong munculnya suatu ideologi. Jika manusia, kelompok, ataupun masyarakat mulai merasakan bahwa berbagai kebutuhan dan tujuan hidupnya tidak dapat direalisasikan, maka kesalahan pertama seringkali ditimpakan kepada ideologi yang ada atau sedang dikembangkan. Biasanya, ideologi yang ada dianggap tidak mampu lagi berbuat, baik dalam menjelaskan eksistennya atau justifikasi terhadap situasi yang sedang terjadi, ataupun dalam melaksanakan aturan main yang dicanangkan sebelumnya. Mereka tidak dapat menerima batasan-batasan mengenai apa yang harus dijunjung tinggi dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari kondisi yang serba kalut, yang dicirikan oleh menghebatnya ketegangan sosial, maka ketidakpuasan terhadap masa lampau dan</p>
--	--

	<p>ketakutan menghadapi masa depan menjadi pendorong muncul dan bangkitnya suatu ideologi yang mampu menjanjikan kehidupan yang lebih baik.</p> <p>b. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis.</p> <p>Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang dilemparkan atau ditawarkan ke tengah-tengah arena perpolitikan. Oleh karena itu, ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh warga masyarakat secara rasional. Sebagai ide yang hendak mengatur tertib hubungan masyarakat, maka ideologi biasanya menyajikan penjelasan dan visi mengenai kehidupan yang hendak diwujudkan. Di samping itu, ideologi sering menampilkan sifat “<i>Self-Contained</i>” dan “<i>Self-Sufficient</i>”. Ini mengandung pengertian bahwa ideologi merupakan suatu pola pemikiran yang terintegrasi antara beberapa premis dasar yang memuat aturan-aturan perubahan dan pembaharuan. Meskipun ideologi dikatakan sebagai suatu pola pemikiran yang sistematis, namun tidak jarang dikatakan bahwa ideologi merupakan konsep yang abstrak. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan ideologi yang kurang mampu menggambarkan tentang realitas dan lebih menggambarkan tentang model atas dasar persepsi tentang realitas yang ideal. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila ideologi cenderung menjadi reduksionis (memandang hal-hal yang kompleks dengan sederhana), dalam arti cenderung menyetengahkan penjelasan dan rekomendasi yang sederhana, umum, dan lebih mudah dipahami.</p> <p>c. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas, namun beragam.</p> <p>Dilihat dari dimensi horisontal, ideologi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari penjelasan-penjelasan yang parsial sifatnya sampai kepada gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan yang komprehensif (misalnya: <i>Weltanschauung</i>). Sebenarnya, sifat serba mencakup dari suatu ideologi sangat tergantung pada ruang lingkup kekuasaan yang dapat dicakupnya. Ideologi-ideologi yang totaliter dapat dikatakan lebih komprehensif dibandingkan dengan ideologi-ideologi yang demokratis karena senantiasa mendambakan kekuasaan mutlak untuk mengatur semua aspek kehidupan. Dengan demikian, ideologi dapat memberikan gambaran tentang masyarakat bangsa yang akan direalisasikan dengan berbagai pola perilakunya. Ideologi dapat menjadi indikator dalam menentukan keberhasilan suatu negara dalam membangun</p>
--	--

	<p>masyarakatnya. Dengan demikian, ideologi dapat menjadi parameter dalam mengukur keber-hasilan suatu bangsa.</p> <p>d. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan.</p> <p>Dilihat dari dimensi vertikal, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan, mulai dari konsep yang kompleks dan <i>Sophisticated</i> sampai dengan slogan-slogan atau simbol-simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan-gagasan tertentu sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan masyarakatnya. Berangkat dari tataran pemikiran semacam ini, dapat dikatakan bahwa ideologi berada pada keragaman landasan yang akhirnya akan membuahkan berbagai pemahaman dan penerimaan dari para pengikutnya. Ketertarikan seseorang pada suatu ideologi bisa didasarkan pada rangsangan intelektual, emosional, atau yang paling sering adalah kepentingan pribadi. Di samping itu, unsur pengikat dapat didasarkan pada daya tarik pemimpin yang kharismatik. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila para “<i>Ideolog</i>” cenderung menunjukkan militansi dan fanatisme terhadap doktrin ideologi sehingga menjadi sumber dukungan yang aktif dan sangat loyal dengan pasif menerima ideologi apa adanya.</p> <p>3. Fungsi Ideologi</p> <p>Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan terhadap ideologi tertentu, barangkali bukan satu-satunya cara, dimana manusia bisa memformulasikan dan mengisi kehidupannya. Ideologi juga bisa memainkan fungsinya dalam mengatur hubungan antara manusia dan masyarakatnya. Setiap kehidupan masyarakat pasti mengharapkan setiap anggotanya dapat terlibat dan tercakup di dalamnya. Untuk itu, ideologi dapat membantu anggota masyarakat dalam upaya melibatkan diri dalam berbagai sektor kehidupan. Di samping fungsinya yang sangat umum, ideologi juga memiliki fungsi yang khusus sifatnya, seperti:</p> <p>a. Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia.</p> <p>Sebagai sistem panutan, ideologi pada dasarnya merupakan formulasi ide atau gagasan melalui mana manusia dapat menerima, memahami, dan sekaligus menginterpretasikan hakikat kehidupan ini. Realitas kehidupan yang sangat kompleks dapat dibuat lebih jelas, lebih memenuhi harapan, dan lebih berarti oleh sebuah ideologi. Orientasi kognitif dari suatu ideologi dapat membantu untuk menghindarkan diri dari sikap ambiguitas, sekaligus memberikan kepastian dan</p>
--	--


	<p>rasa aman dalam mengarungi kehidupannya. Jika manusia melihat ada kekuasaan atau kekuatan yang sulit diprediksikan, maka ideologilah satu-satunya tempat berlindung.</p> <p>b. Ideologi berfungsi sebagai panduan.</p> <p>Sebagai suatu panduan, ideologi mencanangkan seperangkat patokan tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku, di samping tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Seiring dengan fungsinya, ideologi menyajikan saluran-saluran yang dapat dipakai untuk mewujudkan ambisi pribadi atau kelompok, hak dan kewajiban, dan parameter yang menyangkut harapan pribadi dan anggota masyarakat. Ideologi juga dapat memberikan batasan tentang kekuasaan, tujuan, dan organisasi yang berkaitan dengan masalah-masalah politik. Dengan demikian, fungsi ideologi bagi suatu negara bukan sekedar sebagai standar pertimbangan dalam memilih berbagai alternatif, melainkan menyertakan “<i>A Sense Of Self-Justification</i>”, cara-cara mengevaluasi tingkah laku para anggotanya, dan memberikan kerangka landasan bagi legitimasi politik (kekuasaan).</p> <p>c. Ideologi berfungsi sebagai lensa, dimana seseorang dapat melihat dunianya sebagai cermin, dapat melihat dirinya dan sebagai jendela, agar orang lain bisa melihat diri kita.</p> <p>Ideologi merupakan salah satu alat bagi seseorang atau bangsa untuk mengenal dan melihat dirinya sendiri, dan mengharap orang lain untuk bisa melihat dan menginterpretasikan tindakannya yang didasarkan atas ideologinya. Dengan demikian, ideologi merupakan potret diri pribadi, kelompok atau masyarakat yang sangat impresionistis. Ideologi dapat memberikan gambaran tentang manusia dan masyarakat yang diharapkan. Inilah fungsi penting ideologi bagi suatu bangsa dan negara.</p> <p>d. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik, sekaligus fungsi <i>Integrative</i>.</p> <p>Dalam level personal, ideologi dapat membantu setiap individu dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya sendiri ataupun dalam hubungannya dengan orang lain. Di sisi lain, ideologi dapat meningkatkan kebersamaan dengan cara mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan individu. Dalam kehidupan masyarakat, ideologi juga dapat berfungsi membatasi terjadinya konflik. Guna menjamin kontinuitas dan</p>
--	--

	<p>usaha-usaha bersama, suatu masyarakat tidak saja memerlukan pengendalian konflik, tetapi juga memerlukan adanya integrasi secara politis dari para anggotanya. Melalui ideologi setiap anggota masyarakat mampu mengetahui ide, cita-cita, tujuan atau harapan-harapan dari masyarakatnya.</p> <p>4. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka</p> <p>a. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat dalam sikap, perilaku, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat khas untuk refleksi perilaku bangsa Indonesia dan tercermin dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat dinamis. Artinya, upaya pengembangan sesuai dengan perubahan dan tuntutan masyarakat bukan sesuatu yang tabu sehingga nilai-nilai dasar itu tidak menjadi beku, kaku, dan melahirkan sifat fanatik yang tidak logis. Atas dasar pemikiran tersebut, bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka.</p> <p>Menurut Alfian, suatu ideologi yang baik harus mengandung tiga dimensi agar supaya dapat memelihara relevansinya yang tinggi/kuat terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan tuntutan perubahan zaman. Kehadiran ketigadimensi yang saling berkaitan, saling mengisi, dan saling memperkuat itu menjadikan suatu ideologi yang kenyal dan tahan uji dari masa ke masa. Ketiga dimensi yang harus dimiliki oleh setiap ideologi yang terbuka adalah:</p> <p>1) Dimensi realitas.</p> <p>Ideologi merupakan nilai-nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Dengan demikian, masyarakat pendukung ideologi itu dapat merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dengan kata lain, nilai-nilai dasar yang terkristalisasi sebagai ideologi benar-benar tertanam dan berakar dalam kehidupan masyarakatnya.</p> <p>2) Dimensi idealitas.</p> <p>Ideologi harus mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, bangsa</p>
--	--


	<p>yang memiliki ideologi adalah bangsa yang telah mengetahui ke arah mana mereka akan membangun bangsa dan negaranya.</p> <p>3) Dimensi fleksibilitas/pengembangan (Oetojo Oesman dan Alfian, 1993: 192).</p> <p>Ideologi harus memberikan ruang yang memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung dalamnya. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan hanya mungkin dimiliki secara wajar dan sehat oleh suatu ideologi yang terbuka atau ideologi yang demokratis.</p> <p>b. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, dan adanya dinamika internal. Dinamika internal tersebut member peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dan seseuai dengan perkembangan dari masa ke masa. Dengan demikian, ideologi tersebut tetap aktual, selalu berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.</p> <p>Penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka, bukan saja merupakan suatu penegasan kembali polapikir yang dinamis dari para pendiri negara kita pada tahun 1945, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual dalam dunia modern yang berubah dengan cepat. Penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa implikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bangsa Indonesia harus mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang bersifat abadi; 2) Bangsa Indonesia harus menyadari adanya kebutuhan untuk mengembangkan nilai-nilai dasar secara kreatif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. <p>Perlu ditegaskan secara lugas, bahwa pengertian “terbuka” memang dapat diartikan bermacam-macam. Oleh karena itu, perlu kesepakatan mengenai pengertian “terbuka”. Dikatakan sebagai ideologi terbuka, jika ideologi tersebut memungkinkan terjadinya interaksi antara nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan lingkungan sekitar. Artinya, nilai-nilai dasarnya tetap dipertahankan dan bangsa memiliki kesempatan untuk mengembangkan nilai instrumentalnya.</p> <p>Nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945</p>
--	---

	<p>yang meliputi pandangan tentang kemerdekaan, cita-citanasional, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar Negara, sumber kedaulatan rakyat, dan tujuan nasional telah ditempatkan sebagai nilai dasar yang tidak akan dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar yang hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak ingin dan tidak boleh diubah lagi. Konsepsi ini sesuai dengan pendapat para ahli hukum, merubah nilai dasar berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Nilai-nilai dasar biasanya masih bersifat umum dan belum operasional. Oleh karena itu, perlu dirumuskan aturan pelaksana sebagai penjabaran dari Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai penjabaran inilah yang biasadisebut sebagai nilai instrumental. Penjabaran nilai-nilai dasar ini dapat dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilaidasar itu.</p> <p>Nilai-nilai instrumental bukan saja boleh dirubah, bahkan perlu ditinjau secara berkala agar tetapaktual dan sesuai dengan dinamikamasyarakat Indonesia. Misalnya GBHN yang ditetapkan oleh MPR, sekali dalam lima tahun perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Dalam penjelasanpasal 3 UUD 1945 dinyatakan bahwa: "... mengingatdinamikamasyarakat, sekali dalam lima tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendak dipakai di kemudian hari".</p> <p>c. Pengertian terbuka adalah terbuka untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar pada tatanan nilai instrumental. Tentu saja perlu digariskan batas-batas keterbukaan tersebut. Sekurang-kurangnya ada dua pembatasan keterbukaan itu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepentingan stabilitas nasional. <p>Walaupun pada dasarnya semua gagasan untuk menjabarkan nilai dasar dapat diajukan, namun jika sejak awal sudah dapat diperkirakan gagasan itu akan menimbulkan keresahan yang meluas, selayaknya dicarikan momentum, bentuk, serta metode yang tepat untuk menyampaikannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Larangan terhadap ideologi <i>Marxisme-Leninisme/Komunisme</i> <p>Walaupun secara faktual bangsa Indonesia dapat</p>
--	---

	<p>melihat proses kebangkrutan ideologi <i>Marxisme-Leninisme/Komunisme</i>, namun <i>Marxisme-Leninisme/Komunisme</i> tidak dapat diabaikan begitu saja (Soeprapto, 1992: 48). Keterbukaan ideologi Pancasila pada tataran nilai instrumental dan nilai praksisnya bukan berarti bangsa Indonesia membuka diri bagi paham komunisme. Sebaliknya, bangsa Indonesia tetap waspada terhadap kerawanan-kerawanan yang mungkin ditimbulkan oleh paham tersebut. <i>Marxisme-Leninisme-Komunisme</i> memiliki wawasan yang negatif terhadap konflik karena tidak mengenal perdamaian. Dalam pandangannya konflik hanya dapat diakhiri, manakala salah satu pihak yang bertentangan mengalami kehancuran. Prinsip menghalalkan segala cara dalam mencapai cita-citanya dipandang sebagai konsep yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.</p>
--	--

	<h2>RANGKUMAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istilah ideologi berasal dari kata Idea dan Logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, Eidos yang berarti bentuk atau idein yang berarti melihat. Idea dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. 2. Beberapa karakteristik suatu ideologi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis; b. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis; c. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas, namun beragam; d. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. 3. Ideologi memiliki fungsi yang khusus sifatnya, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia; b. Ideologi berfungsi sebagai panduan; c. Ideologi berfungsi sebagai lensa, dimana seseorang dapat melihat dunianya sebagai cermin, dapat melihat dirinya dan sebagai jendela, agar orang lain bisa melihat diri kita; d. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik,

	<p>sekaligus fungsi Integrative.</p> <p>4. Penegasan pancasila sebagai ideologi terbuka membawa implikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bangsa Indonesia harus mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang bersifat abadi; dan Bangsa Indonesia harus menyadari adanya kebutuhan untuk mengembangkan nilai-nilai dasar secara kreatif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman.
--	--

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> Jelaskan pengertian ideologi! Jelaskan karakteristik dan makna ideologi bagi Negara! Jelaskan fungsi ideologi! Jelaskan pancasila sebagai ideologi terbuka!

MODUL 02

HAKIKAT PANCASILA



2 JP (90 Menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini dibahas materi tentang hakikat Pancasila yang meliputi sejarah, kedudukan, fungsi dan peranan, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami hakikat Pancasila.



KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami hakikat Pancasila.

Indikator Hasil Belajar:

1. Menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia;
2. Menjelaskan sejarah Pancasila;
3. Menjelaskan kedudukan Pancasila;
4. Menjelaskan fungsi dan peranan Pancasila;
5. Menjelaskan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara.



MATERI PELAJARAN


Pokok Bahasan:


Hakikat Pancasila.

Subpokok Bahasan:


1. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia;
2. Sejarah Pancasila;
3. Kedudukan Pancasila;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Fungsi dan peranan Pancasila; 5. Pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara.
--	---


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang hakikat Pancasila.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Metode <i>Brainstroming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan pendidik untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Metode Penugasan Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang diberikan.
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>White board</i>. b. <i>Laptop/komputer</i>. c. Papan <i>flipchart</i>. d. OHP/LCD. e. <i>Laserpoint</i> ; f. Pengeras suara/<i>Sound System</i>. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>flipchart</i>. b. Alat tulis.


	<p>3. Sumber Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati, 1995. "Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)" ; RM. A.B. Kusuma, 2017. Menggugat Arsip Nasional Tentang Arsip Otentik" Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia"; Yudi Latif, 2018, Wawasan Pancasila: "Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan"; Sekretariat Jenderal MPR-RI, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, 2012.
--	---

	<p>KEGIATAN PEMBELAJARAN</p>
	<p>1. Tahap Awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuka kelas dan memberikan salam. Perkenalan. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. <p>2. Tahap Inti : 70 Menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik menyampaikan materi tentang Hakikat Pancasila; Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya/berkomentar terkait mata pelajaran yang diberikan; Peserta didik bertanya tentang materi yang belum dimengerti/dipahami; Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik. <p>3. Tahap akhir: 10 Menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum terkait dengan kegiatan pembelajaran. Cek penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

	c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i> /relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.
--	--

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.

	LEMBAR KEGIATAN
	Pendidik menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">HAKIKAT PANCASILA</p> <p>1. Makna Pancasila sebagai Dasar dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia</p> <p>a. Pancasila sebagai dasar negara.</p> <p>Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Pondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara.</p> <p>Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung</p>

	<p>selama berabad-abad. Sebelumnya ditingkat sekolah dasar dan sekolah menengah kalian telah memahami BPUPK menyusun Pancasila dan suasana serta semangat para pendiri negara dalam menetapkan Pancasila dalam Sidang PPKI.</p> <p>Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pertanyaan dan pemikiran tentang dasar negara apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Pertanyaan dan pemikiran Soekarno tergambar dalam kutipan Pidato Ir. Soekarno seperti berikut ini:</p> <p><i>"Saja Mengerti Apakah Jang Paduka Tuan Ketua Kehendaki! Paduka Tuan Ketua Minta Dasar, Minta Filosofi Grondslag, Atau Djikalau Kita Boleh Menggunakan Perkataan Jang Muluk-Muluk, Paduka Tuan Ketua Jang Mulia Meminta Suatu "Weltanschauung" Di Atas Mana Kita Mendirikan Negara Indonesia Itu... Apakah "Weltanschauung" Kita, Djikalau Kita Hendak Mendirikan Indonesia Yang Merdeka".</i></p> <p>Pertanyaan dan pemikiran para pendiri negara mengenai apakah dasar negara Indonesia merdeka. Telah berhasil dijawab oleh para pendiri negara dalam Sidang BPUPK dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara (<i>Philosophische Grondslag</i>) dan ideologi negara (<i>Staatidee</i>). Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi <i>"...Maka Disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia Itu Dalam Suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Yang Terbentuk Dalam Suatu Susunan Negara Indonesia Yang Berkedaulatan Rakyat Dengan Berdasar Kepada..."</i></p> <p>Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara yuridis-konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat dan setiap</p>
--	---

	<p>warga negara, tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang Tata Urutan dan Rumusan dalam Penulisan/Pembacaan/Pengucapan Sila-Sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Pancasila sebagai dasar negara yang telah ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (<i>Ekaprasetya Pancakarsa</i>) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat <i>einmalig</i> (sekali), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.</p> <p>Lebih lanjut, dijelaskan Pancasila sebagai dasar negara menurut Notonegoro seperti dikutip oleh Darji Darmodihardjo, SH (1995 : 8) dinyatakan bahwa <i>"Di Antara Unsur-Unsur Pokok Kaidah Negara Yang Fundamental, Asas Kerohanian Pancasila Adalah Mempunyai Kedudukan Istimewa Dalam Hidup Kenegaraan Dan Hukum Bangsa Indonesia. Norma Hukum Yang Pokok Disebut Pokok Kaidah Fundamental Dari Negara Itu Dalam Hukum Mempunyai Hakikat Dan Kedudukan Yang Tetap, Kuat Dan Tak Berubah Bagi Negara Yang Dibentuk, Dengan Perkataan Lain Dengan Jalan Hukum Tidak Dapat Diubah"</i>.</p> <p>Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental atau dengan kata lain sebagai dasar negara.</p> <p>b. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.</p> <p>Negara dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya, yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kukuh, tentunya bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kukuh pula. Demikian juga dengan negara, agar kuat dan kukuh negara tersebut harus mempunyai dasar negara yang kuat. Dasar Negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara juga adalah cita-cita. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah</p>
--	--

	<p>dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut dengan "ideologi negara".</p> <p>Dilihat dari asal mula kata, ideologi berasal kata <i>Idea</i>, yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita dan <i>logos</i> yang artinya pengetahuan. Secara harfiah, <i>ideologi</i> berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan atau cita-cita. Dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut.</p> <p>Dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat, dan kukuh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Dalam pandangan hidup, terkandung kehidupan yang dicita-citakan yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lainnya.</p> <p>Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut <i>Way Of Life</i>, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.</p> <p>Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan "pandangan hidup". Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia.</p> <p>Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar, untuk apa seseorang itu hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula</p>
--	---

	<p>dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.</p> <p>Pandangan hidup bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Para pendiri negara dengan dilandasi pemikiran dan semangat kebangsaan yang tinggi telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Mengapa harus Pancasila? Mengapa tidak meniru ideologi bangsa lain? Para pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi.</p> <p>Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>c. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.</p> <p>Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila kesatu Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama melandasi sila ketiga, keempat dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama</p>
--	--

	<p>dan kedua serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya.</p> <p>Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut <i>Jimly Asshiddiqie</i> dalam bukunya berjudul <i>Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara</i> (2012 : 122) menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia sehingga perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Dengan demikian, kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa.</p> <p>Semangat Ketuhanan Yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan di antara sesama warga negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan, tidak perlu dipersoalkan mengenai asal-usul (etnisitas), anutan agama, warna kulit dan bahkan status sosial seseorang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia, di mana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>Sesuai dengan pengertian sila Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia diakui sebagai insan beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Paham Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang menjiwai keseluruhan sila-sila dalam Pancasila.</p> <p>Keyakinan akan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam sila kedua Pancasila dalam bentuk kemanusiaan yang menjamin perikehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan, dan perikehidupan yang berkeadilan itu menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa</p>
--	--

	<p>Indonesia di masa depan.</p> <p>Dalam kehidupan bernegara, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum yang saling berjalani satu sama lain. Sebagai konsekuensi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan perwujudan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.</p> <p>Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur seperti dinyatakan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>2. Sejarah Pancasila</p> <p>Pancasila sebagai dasar negara yang memuat pikiran sedalam-dalamnya bangsa merupakan hasil perjuangan para pendiri bangsa. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, sebagaimana dituangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 merupakan hasil puncak perundingan dan pembahasan para pendiri bangsa secara dialektikal dalam sidang-sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau yang diterjemahkan sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK). Badan ini dibentuk sebagai tindak lanjut janji Perdana Menteri Jepang saat itu (bernama Koiso) yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dengan ketua: dr. K.R.T Radjiman Widyodiningrat dengan dua wakil ketua yaitu: Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P. Soeroso.</p> <p>Jepang membagi anggota BPUPK menjadi lima golongan yaitu golongan pergerakan, golongan Islam, golongan birokrat (kepala jawatan), wakil kerajaan (kooti), pangrehpraja (residen/wakil residen/bupati/walikota), peranakan Tionghoa, peranakan Arab, dan peranakan Belanda. Dari semua anggota BPUPK, dua diantaranya perempuan, Maria Ulfah Santoso yang meraih gelar Meester in de Rechten di Universitas Leiden dan R.Siti Soekaptinah Soenarjo Mangoenpoespito seorang guru Taman</p>
--	--

	<p>Siswa dan aktivis Kongres Perempuan Indonesia. Panitia ini dilantik pada 28 Mei, anggotanya semula 62 anggota kemudian ditambah lagi hingga berjumlah 68 anggota.</p> <p>Berkaitan dengan perumusan dasar negara, ketua BPUPK, dr. K.R.T Radjiman Widyodiningrat, pada pidato awal sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, mengajukan pertanyaan kepada anggota sidang: “apa Dasar Negara yang akan kita bentuk ini”. “Dasar negara” ini menjadi penting untuk dibahas terlebih dahulu mengingat keberadaan negara sebagai alat perjuangan bangsa harus memiliki dasar yang kukuh.</p> <p>Pembahasan dasar negara dimulai pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama (Sidang Pleno I), Muhammad Yamin yang menyampaikan pidato pada tanggal 29 Mei 1945 sebagaimana tertuang dalam Himpunan Risalah Sidang-sidang BPUPK dan PPKI terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia jilid pertama tahun 1959. Pidatonya lebih menawarkan tentang negara ketimbang dasar negara. Dalam sidang itu Muhammad Yamin mengusulkan: “...Jadi bentuk negara Indonesia yang merdeka-berdaulat itu ialah suatu republik Indonesia yang tersusun atas paham unitarisme.”</p> <p>Mohammad Hatta, salah seorang anggota BPUPK dan peserta sidang saat itu menyatakan bahwa, Muhammad Yamin tidak menyampaikan konsep dasar negara, hanya berpidato saja. Arsip yang mencatat rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) milik A.G. Pringgodigdo dan arsip A.K. Pringgodigdo yang telah ditemukan menunjukkan bahwa klaim Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 yang mengemukakan 5 (lima) asas bagi negara Indonesia Merdeka (kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat), tidak dapat diterima.</p> <p>Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo mendapat giliran untuk mengemukakan gagasannya. Soepomo tidak menjawab pertanyaan Ketua Sidang dr. K.R.T Radjiman Widyodiningrat, tetapi lebih menekankan pada syarat-syarat berdirinya negara, yaitu: daerah, hal rakyat sebagai warga negara dan pemerintah yang berdaulat menurut hukum internasional. Pada Sidang tanggal 31 Mei 1945 itu, Soepomo juga menawarkan bentuk negara integralistik (negara persatuan) selain negara individualistik dan negara golongan. Jika negara individualistik disusun atas dasar kontraksosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan H. J. Laski;</p>
--	--

maka negara golongan (class theory) mengacu pada bentuk negara yang diajarkan oleh Marx dan Engels. Negara integralistik yang ditawarkan oleh Soepomo, adalah negara yang tidak boleh memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri melampaui semua kepentingan sebagaimana diajarkan Spinoza, Adam Müller, dan Hegel. Soepomo menjelaskan konsep Negara Integralistiknya dengan menjelaskan:

“Negara persatuan tidak berarti, bahwa negara atau Pemerintah akan menarik segala kepentingan masyarakat ke dirinya untuk dipelihara sendiri, akan tetapi menurut alasan- alasan yang “doelmatig” akan membagi-bagi kewajiban negara kepada badan-badan pemerintahan di pusat dan daerah masing-masing atau akan memasrahkan sesuatu hal untuk dipelihara oleh sesuatu golongan atau sesuatu orang, menurut masa, tempat dan soalnya”.

Dengan demikian, Pidato Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 tidak menjawab pertanyaan Ketua BPUPK Dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat tentang dasar negara, melainkan sebatas staatsidee atau tentang dasar pengertian negara Indonesia.

Selanjutnya giliran Soekarno untuk menyampaikan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Soekarno, sebenarnya yang diminta adalah filosofi schegrondslag yaitu fundamental, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atas nyadidirikan “gedung” Indonesia Merdeka. Hal itulah yang dikemukakan Soekarno pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut Soekarno selanjutnya memaknakan filosofi schegrondslag sebagai suatu weltanschauung. Dikemukakan bahwa banyak “negeri-negeri” yang merdeka yang berdiri di atas suatu weltanschauung. Dikatakannya, weltanschauung itu harus sejak awal dibulatkan di dalam pikiran “kita” (para peserta sidang) sebelum Indonesia merdeka datang. Pertanyaan yang dimunculkan kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka di atas weltanschauung apa? Dalam perjalanan sejarahnya Soekarno memimpin seluruh tahap perumusan Pancasila sejak 1 Juni 1945 hingga 18 Agustus 1945. Demikian pula Soekarno adalah pemimpin yang mengambil prakarsa untuk menyusun Piagam Jakarta dan perubahan-perubahannya.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, sesudah pidato Soekarno, BPUPK membentuk Panitia Delapan yang terdiri atas 6 (enam), orang dari golongan Mohammad Hatta, M.Yamin, A.A.Maramis, M. Otto Iskandardinata, dan 2 (dua) orang dari golongan Islam, yaitu Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H Wachid Hasjim. “Panitia Delapan” ini diketuai Soekarno. Ketika Perang Pasifik makin

	<p>membesar, dan di Jakarta, Soekarno mengambil inisiatif membentuk “Panitia Sembilan”, yang diakuinya sebagai ilegal atau melanggar formalitas-prosedural. Menurut Soekarno, formal-prosedural harus diabaikan jika tidak memberi manfaat bagi Indonesia yang akan segera dimerdekakan. Di dalam Panitia Sembilan itu, Soekarno selaku ketua mengubah komposisi keanggotaan Panitia menjadi 4 (empat) orang dari golongan kebangsaan, yaitu: dan 4 (empat) dari golongan Islam, yaitu: Yamin, A.A. Maramis, Achmad Soebardjo, K.H Wachid Hasjim, K.H.Kahar Moezakir, H.Agoes Salim, dan R.Abikoesno Tjokrosoejoso. Ketua Panitia Sembilan adalah Soekarno. Panitia Sembilan dibentuk sebagai ikhtiar mempertemukan pandangan antara dua golongan tersebut menyangkut dasar negara. Seperti diakui Soekarno, “mula-mula ada kesukaran mencari kecocokan paham antara dua golongan ini” namun, dengan komposisi yang relative seimbang antara dua golongan tersebut, panitia ini berhasil menyepakati rancangan Preamble yang didalamnya terdapat rumusan Pancasila. Oleh Soekarno, rancangan Preamble itu diberinama “Mukadimah”, oleh Yamin dinamakan “Piagam Jakarta”, dan oleh Soekiman Wirsosandjojo disebut “Gentlemen’s Agreement”.</p> <p>Soekarno adalah tokoh yang paling aktif melahirkan kompromi Piagam Jakarta, dan mempertahankannya pada Sidang Pleno II BPUPK yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Hal ini membuktikan bahwa Soekarno sebagai anggota dari golongan kebangsaan tidak berlawanan secara diametral dengan golongan Islam. Dengan fakta tersebut, tidaklah benar apabila dikatakan bahwa Soekarno selalu melawan golongan Islam. Soekarno justru sangat aktif memperjuangkan kompromi dengan berupaya mempertemukan pemikiran-pemikiran golongan kebangsaan dengan golongan Islam. Fakta sejarah ini penting untuk diketahui secara jelas oleh segenap bangsa Indonesia untuk menghindarkan dari belenggu persepsi seolah-olah Soekarno bersikap anti atau melawan pemikiran-pemikiran dan usul-usul yang dikemukakan oleh golongan Islam. Panitia Sembilan bertugas menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara, hingga berpuncak pada penerimaan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang oleh Soekarno disebut Mukadimah, pada tanggal 22 Juni 1945. Naskah Mukadimah ditandatangani oleh 9 (Sembilan) orang anggota Panitia Sembilan dan dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada tanggal 11 Juli 1945, Mukadimah diterima oleh BPUPK. Rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya;
--	---

- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Persatuan Indonesia;
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan;
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara historis dengan demikian, ada tiga rumusan Pancasila, yaitu rumusan yang bersumber dari Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPK; Rumusan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari tanggal 1 Juni 1945 kemudian 22 Juni 1945 hingga berpuncak pada rumusan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 dapat dimaknai sebagai satu kesatuan **“rangkaian sejarah dalam proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara”**.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI 1945 telah kembali dikukuhkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan/pembacaan dan pengucapan sila-sila Pancasila. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Dasar Negara. Paparan ini penting untuk menegaskan kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 walaupun status ketetapan MPR tersebut merupakan ketetapan yang tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.

Pengakuan yuridis oleh negara bahwa rumusan Pancasila sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945 yang disampaikan Soekarno, rumusannya dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar Negara telah dinyatakan dalam **Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tersebut pada pokoknya berisikan penetapan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila**. Di dalam Konsideran Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dinyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak kelahirannya tanggal

1 Juni 1945 yang disampaikan Soekarno, rumusannya dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.

3. Kedudukan Pancasila

Pancasila yang rumusannya tercantum dalam **Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**, merupakan resultante penerimaan gagasan dunia seperti : demokrasi, kedaulatan rakyat, gagasan negara berbentuk Republik, dan negara hukum, tetapi dipadu dengan pandangan hidup atau pendirian bangsa yang sudah membudaya yaitu, menjunjung tinggi aspek religiusitas, menjaga kerukunan, musyawarah dan budaya gotong royong. Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 menyatakan kelima prinsip yang dinamakannya Pancasila merupakan weltanschauung yang harus diwujudkan dalam kehidupan konkret. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, dituangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 telah kembali dikukuhkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan/pembacaan dan pengucapan sila-sila Pancasila. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 juga dimuat dalam **Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila** (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Dasar Negara. Paparan ini penting untuk meneguhkan kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 walaupun status ketetapan MPR tersebut merupakan ketetapan yang tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.

Dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Bahwa Pancasila benar-benar menjadi dasar negara, tercermin dari Alinea Keempat Pembukaan UUD Negara RI 1945 yang menyatakan Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

	<p>Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.</p> <p>Sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum tertinggi bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Secara garis besar UUD NRI 1945 mengatur 4 (empat) hal penting: (1) Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum; (2) Pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara; (3) Pengaturan hubungan antar lembaga-lembaga negara dan (4) Pengaturan hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Pancasila sebagai dasar negara dengan demikian, berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia.</p> <p>Jelas pula di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dimuat tujuan negara dan dasar negara Pancasila. Di dalam dokumen Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang diterbitkan MPR pada penerbitan tahun 2012 dinyatakan apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan tujuan negara tersebut, jadilah Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan dalam rangka pencapaian tujuan negara yang didasarkan pada dasar negara. Dengan demikian dalam rangka mencapai tujuan negara, maka penyelenggaraan politik ketatanegaraan, ekonomi, penyelenggaraan hukum, sosial budaya maupun penyelenggaraan pertahanan-keamanan negara termasuk pula politik luar negeri, Pancasila harus dijadikan sebagai bintang penuntun. Inilah makna Pancasila sebagai ideologi. Jadi pengejawantahan Pancasila sebagai ideologi tercermin dalam pembuatan regulasi di bidang-bidang tersebut dan dalam kebijakannya.</p> <p>Secara akademik ideologi dapat disejajarkan dengan apa yang disebut sebagai paradigma. Mengikuti pemaknaan paradigma, maka ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran-pemikiran (<i>a set of ideas</i>) yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi inilah yang menjadi bintang penuntun, payung berpikir, yang menentukan bagaimana</p>
--	---

	<p>seseorang mengkonsepsikan realitas kehidupan masyarakatnya. Apakah dirinya dipahami sebagai makhluk individual atau sebagai makhluk sosial (aspek ontologis) dan bagaimana yang bersangkutan mengkonsepsikan relasinya dengan realitas kehidupan masyarakat sekelilingnya. Apakah dia mengkonsepsikan dirinya sebagai makhluk individu yang tidak memiliki kaitan dengan lingkungan sosialnya ataukah mengkonsepsikan dirinya sebagai bagian anggota masyarakat yang harus menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (aspek epistemologis). Dari ideologi dapat diidentifikasi nilai-nilai (<i>values</i>) suatu bangsa yang mampu menjadi penuntun arah menuju kehidupan yang baik bagi masyarakat bangsa tersebut.</p> <p>Nilai merupakan ide atau konsep yang akan menjadi penuntun seseorang dalam mengkonsepsikan kedudukan dirinya di dalam alam semesta. Dari tuntunan itu kemudian manusia dapat menentukan apa yang disebut kebaikan dan apa yang disebut keburukan dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Dengan perkataan lain, nilai (<i>value</i>) merupakan sebuah ide yang selalu bersifat subjektif, berisi tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari, tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sebuah nilai tumbuh berdasar pengalaman hidup dan tumbuhnya kesadaran rasional, serta dipengaruhi pula oleh lingkungan tatanan sosialnya. Sebuah nilai akan menjadi mengikat sebuah komunitas apabila memang ada objektifikasi dari nilai yang sesungguhnya subjektif itu, melalui proses-proses penerimaan yang benar.</p> <p>Nilai-nilai (<i>values</i>) merupakan sesuatu yang abstrak, ada dalam pikiran manusia. Nilai-nilai (<i>values</i>) memuat tuntunan tentang bagaimana suatu kehidupan harus dijalankan supaya menjadi baik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Pancasila sebagai ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran-pemikiran (<i>a set of ideas</i>) yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai yang menuntun bagaimana tata masyarakat adil dan makmur harus dijalankan guna mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur.</p> <p>Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, yang melandaskan pada keyakinan bahwa manusia sejatinya diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Berdasarkan keyakinan itu, maka nilai-nilai: religiusitas, keadilan, gotong royong, musyawarah, dan mengakui keberagaman sebagai kodrat, menjadi utama bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dari perjalanan sejarah pendahulu Bangsa</p>
--	---

Indonesia sejak masa lampau dan bersumber dari: (1) religiusitas bangsa Indonesia; (2) adat istiadat; (3) kearifan lokal; (4) pandangan atau filsafat pemikiran dan ideologi yang berkembang ketika Pancasila dilahirkan; (5) budaya yang tumbuh dalam kehidupan bangsa; (6) konsepsi hubungan individu dengan masyarakat yang sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Dalam cara berpikir Indonesia, realitas tidak dimaknai dengan dominasi logika empiris (faktual), tetapi selalu diseimbangkan dengan melibatkan aspek-aspek keilahian (religiusitas). Humanisme dalam perspektif cara berpikir Indonesia dikonsepsikan sebagai semangat yang mengutamakan kemanusiaan serta dilandasi semangat gotong royong. Keyakinan humanisme bangsa Indonesia berangkat dari cara berpikir bahwa seorang individu adalah bagian dari masyarakat secara keseluruhan sebagai ciptaan Tuhan. Dengan kata lain, manusia sesungguhnya diciptakan dalam kebersamaan. Dengan demikian, Pancasila adalah komposisi dari nilai-nilai bukan nilai-nilai yang saling terpisah.

4. Fungsi dan Peranan Pancasila

Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut:

a. Pancasila sebagai **jiwa bangsa Indonesia**.

Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam Jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa Bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak Bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak Proklamasi Kemerdekaan.

b. Pancasila sebagai **kepribadian bangsa Indonesia**.

Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain.

c. Pancasila sebagai **sumber dari segala sumber hukum**.

Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental (penjabaran dari nilai dasar).

	<p>d. Pancasila sebagai perjanjian luhur.</p> <p>Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat.</p> <p>e. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.</p> <p>Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.</p> <p>f. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.</p> <p>g. Pancasila sebagai moral pembangunan.</p> <p>Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan.</p> <p>5. Pentingnya Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara</p> <p>a. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup.</p> <p>Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut:</p> <p>1) Ketuhanan Yang Maha Esa.</p> <p>Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.</p>
--	--

	<p>2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.</p> <p>Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara.</p> <p>3) Persatuan Indonesia.</p> <p>Merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-belah oleh sebab apa pun.</p> <p>4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.</p> <p>Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan.</p> <p>5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.</p> <p>Semuanya sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas.</p> <p>Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini telah membuktikan keberadaan Pancasila yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Pancasila diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.</p> <p>Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila</p>
--	---

	<p>adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila berarti kita tidak mengubah, menghapus, dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain.</p> <p>Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang ingin mengganti Pancasila, berarti mengancam keberadaan negara Indonesia. Jika dasar negara diganti, runtuhlah bangunan negara Indonesia. Oleh karena itu, mempertahankan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat Indonesia.</p> <p>b. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai intisari dalam butir-butir pengamalan Pancasila, sebagai berikut:</p> <p>1) Ketuhanan Yang Maha Esa.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang Adil dan Beradab; c) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; e) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia Tuhan Yang Maha Esa; f) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; g) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
--	---

	<p>2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat- nya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya; c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia; d) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan <i>Tepa Selira</i>; e) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain; f) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; g) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; h) Berani membela kebenaran dan keadilan; i) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia; j) Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. <p>3) Persatuan Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan ke- selamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepen- tingan pribadi dan golongan; b) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa; c) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa; d) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia; e) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; f) Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika;
--	--

	<p>g) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.</p> <p>4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.</p> <p>a) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama;</p> <p>b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain;</p> <p>c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;</p> <p>d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;</p> <p>e) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah;</p> <p>f) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;</p> <p>g) Di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;</p> <p>h) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;</p> <p>i) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama;</p> <p>j) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.</p> <p>5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia</p> <p>a) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;</p> <p>b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;</p> <p>c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;</p>
--	--

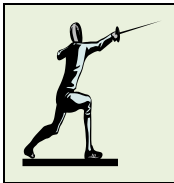
	<ul style="list-style-type: none">d) Menghormati hak orang lain;e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;f) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;g) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;h) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;i) Suka bekerja keras;j) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama;k) Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. <p>Butir-butir nilai Pancasila di atas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di manapun berada.</p>
--	--



RANGKUMAN

1. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, sebagaimana dituangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 merupakan hasil puncak perundingan dan pembahasan para pendiri bangsa secara dialektikal dalam sidang-sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau yang diterjemahkan sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK). Badan ini dibentuk sebagai tindak lanjut janji Perdana Menteri Jepang saat itu (bernama Koiso) yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai kemudian membagi anggota BPUPK menjadi lima golongan yaitu golongan pergerakan, golongan Islam, golongan birokrat (kepala jawatan), wakil kerajaan (kooti), pangrehpraja (residen/wakil residen/bupati/walikota), peranakan Tionghoa, peranakan Arab, dan peranakan Belanda.
2. Sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum tertinggi bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Secara garis besar UUD NRI 1945 mengatur 4 (empat) hal penting:
 - a. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum;
 - b. Pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara;
 - c. Pengaturan hubungan antar lembaga-lembaga negara; dan
 - d. Pengaturan hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Pancasila sebagai dasar negara dengan demikian, berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia.
3. Fungsi dan peranan Pancasila telah kita kenal sebagai:
 - a. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia;
 - b. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia;
 - c. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
 - d. Pancasila sebagai perjanjian luhur;
 - e. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia;
 - f. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

	<p>g. Pancasila sebagai moral pembangunan.</p> <p>4. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia sebagai :</p> <p>a. Pancasila sebagai dasar negara;</p> <p>b. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia; dan</p> <p>c. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.</p> <p>5. Pentingnya Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara sebagai:</p> <p>a. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup;</p> <p>b. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p>
--	---

**LATIHAN**

1. Jelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia !
2. Jelaskan sejarah Pancasila !
3. Jelaskan kedudukan Pancasila !
4. Jelaskan fungsi dan peranan Pancasila !
5. Jelaskan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara !

MODUL

03

PANCASILA DAN JATI DIRI BANGSA



2 JP (90 menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini dibahas materi pengertian jati diri bangsa, jati diri bangsa Indonesia serta sumber jati diri bangsa Indonesia;

Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami dan menerapkan Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia.



KOMPETENSI DASAR

Memahami Pancasila dan jati diri bangsa.

Indikator hasil belajar:

1. Menjelaskan pengertian jati diri bangsa;
2. Menjelaskan jati diri bangsa Indonesia;
3. Menjelaskan sumber jati diri bangsa Indonesia;




MATERI PELAJARAN


Pokok Bahasan:

Pancasila dan jati diri bangsa.


Subpokok Bahasan :

1. Menjelaskan pengertian jati diri bangsa;
2. Menjelaskan jati diri bangsa Indonesia;
3. Menjelaskan sumber jati diri bangsa Indonesia;


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi Pancasila dan jati diri bangsa. 2. Metode <i>brainstroming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan pendidik untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode diskusi Metode ini digunakan oleh pendidik untuk menugaskan peserta didik mendiskusikan suatu persoalan atau masalah yang diberikan oleh pendidik. 5. Metode praktik / drill Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik membuat kegiatan penerapan Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia. 6. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>White board</i>; b. <i>Laptop/komputer</i>; c. Papan <i>flipchart</i>; d. OHP/LCD; e. <i>Laserpoint</i>; f. Pengeras suara/<i>Sound System</i>. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>Flipchart</i>;


	<p>b. Alat tulis.</p> <p>3. Sumber belajar:</p> <p>a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/576/III/2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pelatihan Pra Bintara Noken Polri dalam Penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2020;</p> <p>b. Haryo Sumantri dan Edi Setiawan. 2019. <i>"Jati Diri Bangsa, Kyai Muchammad Muchtar Mu'thi Sang Mujaddid Wawasan Kebangsaan"</i>. Jakarta: Orshid;</p> <p>c. Langgeng Purnomo.2020."Draf Buku Kado Untuk Bangsa Indonesia". Jakarta.</p>
--	---

	<p>KEGIATAN PEMBELAJARAN</p>
	<p>1. Tahap Awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi dengan kegiatan:</p> <p>a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melaksanakan refleksi materi sebelumnya;</p> <p>b. Pendidik mengaitkan materi yang telah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan</p> <p>c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.</p> <p>2. Tahap Inti : 70 Menit</p> <p>a. Pendidik menyampaikan materi Pancasila dan jati diri bangsa.</p> <p>b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami</p> <p>c. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya/berkomentar terkait mata pelajaran yang diberikan.</p> <p>d. Peserta didik bertanya tentang materi yang belum dimengerti/dipahami;</p> <p>e. Pendidik menugaskan peserta didik untuk mendiskusikan penerapan Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia;</p> <p>f. Peserta didik melaksanakan diskusi untuk membuat kegiatan penerapan Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia.</p> <p>g. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.</p> <p>3. Tahap akhir: 10 Menit</p>

	<p>a. Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum terkait dengan kegiatan pembelajaran.</p> <p>b. Cek penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas lapangan.</p>
--	--

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan hasil penugasan tentang hubungannya Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia kepada pendidik.

	LEMBAR KEGIATAN
	Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat tulisan tentang apa yang telah peserta didik lakukan, lihat dan rasakan sehari-hari dalam hubungannya dengan Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia (minimal 1 lembar kertas folio).

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">PANCASILA DAN JATI DIRI BANGSA</p> <p>1. Pengertian Jati Diri Bangsa</p> <p>Pengertian jati diri bangsa dilihat dari etimologi, terminologi dan kebangsaan sebagai berikut :</p> <p>a. Jati diri bangsa menurut etimologi</p> <p>Jati diri bangsa tersusun dari frasa jati diri dan kata bangsa. Frasa jati diri secara etimologi bermakna hakikat atau fitrah sesuatu yang menggambarkan karakter, watak, kepribadian dan moral. Sedangkan bangsa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Bisa juga berarti kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan menempati wilayah tertentu di muka bumi.</p> <p>Kata bangsa, dalam bahasa Inggris disebut sebagai <i>nation</i>, yang kemudian kata ini diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti dalam kata nasional dan nasionalisme. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, kata nasional bermakna bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, atau meliputi suatu bangsa. Sedangkan kata nasionalisme memiliki arti paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, sifat kenasionalan. Serta bisa juga dimaknai dengan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, serta bermakna sebagai semangat kebangsaan.</p> <p>Dari gabungan frasa jati diri dan kata bangsa ini, secara bahasa jati diri bangsa dimaknai dengan hakikat atau fitrah suatu kelompok masyarakat yang sama asal keturunan adat, bahasa dan sejarahnya yang kemudian memiliki pemerintahan sendiri dan menggambarkan karakter, watak, kepribadian dan moral sesungguhnya.</p>

b. Jati diri bangsa menurut terminologi

Jati diri bangsa menurut terminologi atau pemaknaan istilah, terdapat beberapa pendapat berikut ini :

- 1) Dalam Buku *Jati Diri Bangsa*, Kyai Muhammad Muchtar Mu'thi Sang Mujaddid Wawasan Kebangsaan, jati diri bangsa bermakna watak, karakter, kepribadian, sifat dan moral bangsa sebagai keadaan yang sebenarnya dari dalam diri suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya. Jati diri bangsa memiliki sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, pedoman dalam bertindak, pijakan berperilaku, pengendalian budi pekerti, etika sebagai bangsa bereaksi serta berintraksi dengan bangsa lain dan tabiat yang dimiliki bangsa itu (Sumantri, Setiawan, 2019).
- 2) Menurut Soz Gumilar Rusliwa Somantri menyebutkan bahwa jati diri adalah sesuatu yang membuat kita lekas mengenali kebangsaan seseorang dari tutur kata, perilaku dan pandangannya. Jati diri mudahnya semacam moralitas publik yang menjadi pegangan kehidupan orang per orang dalam sebuah bangsa (Somantri, 2010). Di sini, Somantri mengatakan bangsa sebagai entitas yang dipersepsi memiliki hakikat yang memang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya.

Dari beberapa istilah di atas dapat disebutkan juga bahwa jati diri bangsa adalah karakter suatu bangsa yang mencakup pada kepribadian bangsa, identitas bangsa dan keunikan bangsa itu sendiri. Jadi fokus pada definisi ini adalah karakter hakiki yang dimiliki oleh kumpulan manusia yang membentuk suatu bangsa.

c. Jati diri bangsa menurut kajian kebangsaan

Dalam penelusuran jati diri menurut kajian kebangsaan, perlu penjelasan dahulu tentang aspek-aspek yang melingkupi suatu bangsa. Secara umum, unsur pokok terbentuknya suatu bangsa meliputi persamaan sejarah, persamaan cita-cita dan kondisi objektif lain seperti bahasa, ras, agama dan adat istiadat. Kemudian, perlu juga mengetahui bagaimana perkembangan maknanya.

Usman Pelly pernah mendiskusikan tentang batas-batas bangsa dalam Jurnal *Antropologi Indonesia*, Universitas Indonesia. Ia menyebut bahwa kajian klasik antropologi yang

	<p>menelusuri batas-batas bangsa awalnya terpengaruh dengan kajian batas-batas etnik, contohnya pendapat Malinowski. Ia menyebut bahwa satu kelompok etnik dapat dibedakan dengan yang lain baik dalam organisasi kekerabatan, bahasa, agama (sistem kepercayaan), ekonomi, tradisi (hukum), maupun pola hubungan antar etnik, termasuk dalam pertukaran jasa dan pelayanan. Atas dasar ini, kemudian Malinowski mengemukakan asumsi bahwa kelompok etnik merupakan prototipe bangsa (Pelly, 1997).</p> <p>Beberapa bangsa di dunia memang tidak bisa dipisahkan antara kelahirannya dengan kelompok etnisnya, seperti di beberapa negara Eropa terutama setelah revolusi Perancis. Era itu, lahirnya suatu bangsa memang sangat erat kaitannya dengan kebangkitan suatu kelompok etnik. Di negara-negara Asia juga demikian, ada beberapa bangsa yang terbentuk dari kesepakatan etnis yang dominan, contohnya seperti Thailand dan Jepang.</p> <p>Namun ternyata tidak seluruh bangsa merupakan kelanjutan dari kelompok etnis belaka. Gerakan anti kolonial abad ke-20 yang merambah ke Asia, Amerika Latin dan Afrika membuat makna bangsa semakin berkembang, ia tidak lagi sebatas kelompok etnik namun juga terpengaruh dengan faktor lain seperti persamaan sejarah (sama-sama terjajah) dan persamaan cita-cita. Dalam hal ini, para pakar kemudian membedakan antara karakteristik obyektif dan subyektifnya. Karakteristik obyektif suatu bangsa bisa berupa wilayah teritorial, sejarah, struktur ekonomi, bahkan bahasa dan agama. Sementara karakteristik subyektif yaitu kesadaran (<i>consciousness</i>), kesetiaan (<i>loyalty</i>) dan kemauan (<i>will</i>) (Pelly, 1997).</p> <p>Dalam hal ini, justru karakteristik subyektif inilah yang terus dipupuk oleh kesatuan bangsa, karena ketika menjadi satu negara bangsa, orang-orang yang ada dalam bangsa itu harus terus mengaktifkan kesadaran, kesetiaan dan kemauan atau cita-cita bangsanya. Jika kemudian keaktifan subyektif ini semakin berkurang, suatu bangsa akan tergerus kesatuannya. Inilah mengapa kebangsaan (<i>nationalhood</i>) merupakan suatu bentuk loyalitas yang sifatnya fluktuatif, dapat naik dan turun.</p> <p>Jati diri bangsa dimaknai sebagai karakter hakiki suatu bangsa sesungguhnya telah dimiliki oleh setiap manusia yang tergabung dalam kelompok bangsa itu. Namun, adanya dua karakter bangsa yakni obyektif dan subyektif membuat seseorang tidak bisa mengabaikan salah satunya saja. Jika</p>
--	---

seseorang hanya berada dalam lingkup obyektif misalnya, ia hanya tinggal di wilayah tertentu, ia paham sejarah wilayah tersebut, namun ia tidak memiliki rasa apapun pada wilayah tersebut. Seperti tidak memiliki kesadaran, kesetiaan apalagi kemauan, maka contoh seperti ini tidak bisa disebut sebagai orang yang memiliki jati diri bangsa.

Dari ulasan perkembangan, batasan makna bangsa dan contoh di atas dapat dipahami bahwa lahirnya suatu negara bangsa bukanlah tujuan akhir dari kesepakatan bersama, namun menjadi sarana untuk hidup harmonis di bawah payung kesadaran, kesetiaan dan cita-cita. Kyai Muhammad Muchtar Mu'thi menyebutkan bahwa jati diri bangsa dalam konteks ini, untuk merubah nasib bangsa ke arah yang lebih baik sebagai manusia yang hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

2. Jati diri Bangsa Indonesia

Selama ini ketika kita ditanyai apa jati diri bangsa Indonesia, kita selalu menjawab dengan beragam. Bisa jadi ada yang menjawab ramah, murah senyum, gotong royong, dan lain sebagainya. Namun pada hankar ini, terdapat satu jawaban ijtihad untuk menyatukan pemahaman apa jati diri bangsa Indonesia. Kyai Muhammad Muchtar Mu'thi menyebut bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. NKRI lahir karena ada dua faktor yakni internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dengan uraian berikut ini:

a. Sejarah kejayaan masa lampau

Bahwa salah satu unsur pokok suatu bangsa adalah ikatan sejarah. Ingatan-ingatan kolektif bangsa Indonesia sebelum adanya imperialisme membawa semangat tersendiri yang dimiliki bangsa Indonesia. Seperti sejarah kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi pusat perdagangan dan pelayaran internasional. Kemudian kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk, dan dibantu oleh Patih Gajah Mada menjadi sebuah kerajaan yang menguasai Nusantara dengan wilayah yang melebihi wilayah Indonesia saat ini.

b. Perlawanan imperialisme

Praktek imperialisme di Indonesia menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa. Kekayaan Indonesia dikeruk serta jutaan nyawa telah menjadi korban sebab penjajahan. Alasan-alasan inilah yang mendorong

	<p>perlawanan bangsa Indonesia terhadap imperialisme, dan membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia.</p> <p>c. Munculnya pergerakan dari cendekiawan</p> <p>Perlawanan bangsa Indonesia lahir juga dari kalangan cendekiawan, mereka membangun kekuatan melalui jalur organisasi dan diplomasi. Ini menjadi pelengkap atas perjuangan fisik yang tetap digencarkan saat itu (Sumantri, Setiawan, 2019).</p> <p>Kemudian faktor eksternal, faktor ini berasal dari luar bangsa Indonesia yaitu gerakan kebangsaan Asia-Afrika. Bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang sebagian besar juga terkena dampak imperialisme bangkit melawan dan berhasil menjadikannya negara-negara berdaulat. Contoh negara-negara yang mewarnai gerakan kebangsaan Asia-Afrika India, Filipina, Jepang, Cina dan lain sebagainya.</p> <p>Gerakan kebangsaan Asia-Afrika bertujuan untuk menghancurkan pemerintahan kolonial Barat, menghentikan eksploitasi ekonomi dan membangun negara nasional yang demokratis. Pada dasarnya, gerakan ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu (a) persamaan karakter dari sekelompok manusia yang timbul karena persamaan nasib, yakni terjajah oleh bangsa asing (b) keinginan bangsa untuk hidup bersama dan bersatu, didorong oleh rasa kesetiakawanan yang tinggi (c) rasa persatuan dan semangat kebangsaan dari sekelompok manusia yang tinggal di daerah yang sama.</p> <p>Faktor internal dan eksternal itulah yang kemudian membuat bangkitnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dalam sejarah, pergerakan sedikit demi sedikit terbangun oleh para pemuda, contohnya seperti organisasi Budi Oetomo yang mendapatkan kesempatan politik untuk memajukan bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1927, Partai Nasional Indonesia (PNI) terbentuk oleh sekelompok <i>study club</i> pemuda di Bandung. Partai ini dihidupi oleh beberapa tokoh seperti Ir. Soekarno, Mr. Sartono, Mr. Ali Sastroamidjoyo dan lainnya yang bergerak di bidang politik, sosial dan ekonomi. Semua pergerakan ini nyatanya berdampak pada semangat kebangsaan (Sumantri, Setiawan, 2019).</p> <p>Di era itu, organisasi-organisasi kedaerahan, dan keagamaan juga dibentuk. Seperti halnya organisasi pemuda kedaerahan <i>Jong Java</i> yang dipimpin oleh Joko Musyaid, <i>Jong Islam</i> dipimpin oleh Johan Muhammad, <i>Jong Batak</i> dipimpin oleh Amir Syarifuddin, <i>Jong Sumatera</i> dipimpin oleh Muhammad Yamin, <i>Jong Celebes</i> yang dipimpin oleh Sindek, <i>Jong Ambon</i> dipimpin oleh Ley Mina,</p>
--	--

organisasi pemuda Betawi dipimpin oleh Royhani, dan ada juga organisasi pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Kotjo Sungkono.

Organisasi pergerakan kepemudaan juga mendirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang melaksanakan kongres untuk pertama kalinya di Jakarta pada 30 April – 2 Mei 1926 dengan tujuan untuk memajukan paham kebangsaan dan mengeratkan hubungan antara semua perkumpulan-perkumpulan pemuda bangsa. Dua tahun kemudian, pada tanggal 26-28 Oktober 1928, diadakan kongres PPI yang kedua dan terjadi 2 kejadian yang luhur. Pertama adalah sumpah pemuda dan kedua adalah dinyanyikannya lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk pertama kali. Kemudian, seiring berjalannya waktu, seluruh elemen bangsa Indonesia mampu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ini diartikan sebagai jembatan emas untuk mencapai segala cita-cita bangsa.

3. Sumber Jati Diri Bangsa Indonesia

Untuk menemukan jati diri bangsa Indonesia, mari kita pahami bagaimana pembacaan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan metode rasa sebagaimana disampaikan oleh Kyai Muchtar Mu'thi untuk mengerti maksud dan tujuan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut :

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan

	<p><i>Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</i></p> <p>Pada alinea 1, bahwa yang dihapuskan adalah sifat penjajahan, bukan manusiannya. Sifat penjajahan adalah sifat serakah, nafsu tamak, nafsu yang merampas hak-hak orang lain, nafsu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dalam alinea ini, terdapat tiga garis besar asasi bangsa, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak asasi bangsa: <i>“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”</i>; Kewajiban asasi bangsa: <i>“oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan”</i>; Alasan asasi bangsa <i>“karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”</i>. <p>Pada alinea ke 2, kata saat yang berbahagia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Alinea 2 juga berarti bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia menuju cita-cita bangsa Indonesia yaitu <i>“merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”</i>.</p> <p>Pada alinea 3, yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-3, <i>“Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya”</i>.</p> <p>Jadi timbul dari kata ‘ini’, menyatakan sesuatu yang sangat dekat, bukan jauh. Sesuatu yang paling dekat dengan bangsa Indonesia, adalah jati diri bangsa Indonesia itu sendiri, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Itulah santunnya bangsa Indonesia dengan mendahulukan kalimat <i>“Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”</i>, yang mewakili keimanan bangsa. Sesuatu Ciptaan Tuhan yang paling luhur, paling mulia adalah manusia.</p> <p>Dari manunggalnya <i>“Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur”</i>, atau disebut juga ‘manunggalnya keimanan dan kemanusiaan’ maka timbullah</p>
--	---

	<p>kemerdekaan bangsa dan berdirinya negara ini. Kalimat tersebut disambung oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu <i>“Kami bangsa Indonesia dengan ini, menyatakan kemerdekaan Indonesia”</i>. Oleh sebab itu Soekarno disebut juga Penyambung Lidah Rakyat, yang juga menyambung suara (cita-cita kemerdekaan) rakyat Indonesia ke seluruh dunia.</p> <p>Yang paling dekat saja tidak dikenal, tergiur yang dari luar (depan itu), salah satunya tergiur dengan uang, jabatan dan lainnya, jadi lupa <i>“dengan ini”</i>. Bukan kata ‘itu’, jadi kemerdekaan kita bukan hadiah dari sekutu karena kalahnya Jepang atas Sekutu, bukan juga dari Jepang tetapi semata-mata <i>“dengan ini”</i> yaitu dengan manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Karena terlalu dekatnya, sampai tidak dikenal atau bahkan dilupakan. Seperti halnya telinga kita yang sangat dekat dengan kita, setelah dipegang tangan kita baru sadar bahwa itu telinga kita.</p> <p>Pada alinea 4, yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke- 4, adalah 5 tujuan negara yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Melindungi segenap bangsa Indonesia</i> <i>Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia</i> <i>Untuk memajukan kesejahteraan umum</i> <i>Mencerdaskan kehidupan bangsa</i> <p>Bukan mencerdaskan otak manusia saja, akan tetapi seluruh kehidupannya bangsa harus cerdas, kehidupan pertaniannya cerdas, kehidupan ekonominya cerdas, kehidupan hukumnya cerdas, kehidupan politiknya cerdas, kehidupan sosialnya cerdas, kehidupan medis kedokterannya cerdas dan lain sebagainya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Ikut menertibkan dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.</i> <p>Dasar kemerdekaan adalah hak kendali penuh atas diri sendiri setiap individu dan atau bangsa, tanpa campur tangan pihak lain serta tidak bergantung pada pihak lain. Jika kita menjalankan jati diri bangsa ini, sangatlah mungkin bangsa kita akan menjadi bangsa adi daya (<i>super power</i>) dan pemimpin perdamaian dunia. Perdamaian abadi seperti hanya perdamaian antara siang dan malam. Jika dunia siang terus tanpa adanya malam, dipastikan dunia ini terbakar. Dan jika dunia ini malam terus tanpa adanya siang, dipastikan dunia ini beku. Oleh sebab itu diperlukan perdamaian yang abadi.</p>
--	---

	<p>Kemudian bagaimanakah jati diri bangsa Indonesia itu? Seperti yang dikemukakan di depan bahwa tiap bangsa memiliki ciri khas yang membedakan dengan bangsa lainnya. Merujuk kembali pendapat Kyai Muhammad Muchtar Mu'thi yang menyebut bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Definisi dari Kyai Muchtar Mu'thi ini setidaknya terdiri dari tiga variabel, pertama kata manunggal, kedua keimanan dan ketiga kemanusiaan. Maksudnya, manunggal adalah menyatu melebur menjadi satu, bukan dua hal yang coba disatukan, memang pada dasarnya antara keimanan dan kemanusiaan ini menyatu, kemudian ketiga variabel ini dibalut dengan rasa cinta yang mampu memberikan kesadaran, kesetiaan dan kemauan bersama dalam berbangsa.</p> <p>Penyebutan jati diri bangsa Indonesia manunggalnya keimanan dan kemanusiaan oleh Kyai Muhammad Muchtar Mu'thi ini merujuk pada karya agung konsesus nasional, seperti Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Secara tegas jiwa jati diri bangsa Indonesia terdapat pada sila kesatu dan kedua Pancasila, sedangkan sumber jati diri bangsa Indonesia terdapat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ketiga. Inilah pondasi kokoh yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Dalam konteks ini, Kyai Muchtar Mu'thi menangkap makna-makna jati diri bangsa melalui <i>priksa</i>, <i>rasa</i>, <i>karsa</i> dan <i>ilham ruhi</i>, pendekatan yang sejalan dengan jati diri manusia yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan identitas yang hakiki.</p> <p>Dalam kutipan ceramahnya, Kyai Muhammad Muchtar Mu'thi membaca Pancasila sebagai berikut.</p> <p><i>“Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan karena manunggal dengan keimanan, jadi sila kesatu dan kedua tidak terpisahkan, dan inilah jati diri bangsa Indonesia. Apabila jiwa jati diri bangsa berada dalam jiwa kita secara otomatis perilaku kita sesuai dengan kandungan nilai-nilai sila kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima.”</i></p> <p>Ini menunjukkan bahwa sila pertama dan kedua menjadi jiwa jati diri bangsa, yang mendorong jiwa kita secara otomatis berperilaku sesuai nilai-nilai sila Pancasila. Jika jati diri, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ini tidak berada dalam jiwa bangsa, alih-alih akan mencapai hidup yang adil dan beradab, yang ada justru akan <i>dzolim</i> dan biadab. (Sumantri, Setiawan, 2019).</p> <p>Kemudian apa maksud dari kata keimanan yang tercermin dalam jati diri bangsa Indonesia? Keimanan merupakan fakta sejarah</p>
--	--

	<p>yang tidak bisa dilepaskan dari sisi spiritualitas masyarakatnya. Di Indonesia, seperti yang umum telah diketahui bahwa ada beberapa agama yang banyak diyakini, seperti Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu ada juga masyarakat yang masih menganut kepercayaan nenek moyangnya seperti Sunda Wiwitan (Jawa Barat), Kejawen/kebatinan (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Parmalim (Sumatera Utara), Tonaas Walian (Minahasa), Marapu (Sumba), Mulajdi Nabolon (Sumatera Utara) dan lain sebagainya. Ini merupakan karakter bangsa yang berkepribadian luhur karena dalam kehidupannya, bangsa Indonesia diliputi dengan ajaran keimanan yang kuat sejak lahir.</p> <p>Jika jati diri merupakan hakikat manusia yang dianugerahi oleh Tuhan sejak lahir, maka sangat relevan jika Kyai Muhammad Muchtar Mu'thi menyebut bahwa Indonesia memiliki kekuatan <i>ilahiah</i> yang tersembunyi. Beliau telah melakukan pembacaan pilar-pilar kebangsaan hingga simbol-simbol kenegaraan bukan hanya dengan akal namun juga rasa. Inilah yang sedang digaungkan, bahwa bangsa Indonesia perlu menggali rasa yang dimilikinya untuk mengetahui jati diri bangsanya.</p> <p>Sedangkan makna kemanusiaan adalah sifat yang melandasi hubungan antar manusia, dan merupakan sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia agar mampu memperlakukan manusia sesuai hakikatnya. Kemanusiaan dalam jati diri bangsa Indonesia ini menganut pada azas, kaidah, norma dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Azas bangsa Indonesia atau falsafah dasarnya adalah Pancasila, kaidahnya merujuk pada UUD NRI Tahun 1945, normanya sesuai pada Undang-Undang dan tradisinya mengikuti model yang sesuai dengan peraturan masyarakat. Komponen-komponen tersebut menghasilkan etika, estetika dan budi pekerti (Sumantri, Setiawan, 2019). Sehingga kemanusiaan dalam jati diri bangsa mencakup seluruh elemen yang ada pada level terbawah, seperti kekeluargaan hingga level tertinggi yakni kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>Dalam pandangan Kyai Muchammad Muchtar Mu'thi, gerak manusia itu didorong keyakinan yang menjiwai jiwanya. Ada tiga poin utama dalam mengupas ini. Pertama, gerak aktivitas hidup manusia itu ditentukan oleh gerak jiwanya. Arah gerak jiwa manusia itu ditentukan oleh kecondongan keyakinan yang menjiwai jiwa manusia itu sendiri. Kedua, jika keyakinan materialisme yang menjiwai jiwa manusia itu, maka pastilah arah gerak manusia itu hanya menuju kepada tumpuan materi semata. Ketiga, tetapi bila keyakinan manunggalnya keimanan dan kemanusiaanlah yang menjiwai jiwa manusia itu, maka pastilah arah gerak jiwanya akan menuju kepada kebaikan, kemanfaatan</p>
--	---


	untuk kemanusiaan.
--	--------------------



RANGKUMAN

1. Dari gabungan dua kata 'rasa' dan 'wawasan', secara bahasa, rasa wawasan dapat disebut sebagai tanggapan hati terhadap cara pandang sesuatu yang mengedepankan mawas diri. Sedangkan Karsa berdasarkan pendekatan pendidikan Ki Hajar Dewantara, merupakan salah satu wujud kongkrit yang dicontohkan oleh setiap orang, bahwa setiap orang harus memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu memotivasi, memberikan teladan dan dorongan. Untuk meraih cita-cita bangsa Indonesia, sepatutnya rasa wawasan dan karsa kebangsaan digunakan sebagai pendekatan dan metode pemahamannya. Terkhusus untuk memahami Pancasila dan karya agung konsensus nasional lainnya.
2. Jati diri bangsa adalah karakter suatu bangsa yang mencakup pada kepribadian bangsa, identitas bangsa dan keunikan bangsa itu sendiri.
3. Kyai Muhammad Muchtar Mu'thi menyebut bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. NKRI lahir karena ada dua faktor yakni internal dan eksternal.
4. Faktor internal merupakan faktor yang membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dengan uraian berikut ini:
 - a. Sejarah kejayaan masa lampau;
 - b. Perlawanan imperialisme;
 - c. Munculnya pergerakan dari cendekiawan.
4. Faktor eksternal berasal dari luar bangsa Indonesia yaitu gerakan kebangsaan Asia-Afrika. Bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang sebagian besar juga terkena dampak imperialisme bangkit melawan dan berhasil menjadikannya negara-negara berdaulat. Contoh negara-negara yang mewarnai gerakan kebangsaan Asia-Afrika India, Filipina, Jepang, Cina dan lain sebagainya
5. Kemanusiaan dalam jati diri bangsa Indonesia ini menganut pada azas, kaidah, norma dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Azas bangsa Indonesia atau falsafah dasarnya adalah Pancasila, kaidahnya merujuk pada UUD NRI Tahun 1945, normanya sesuai pada Undang-Undang dan tradisinya mengikuti model yang sesuai dengan peraturan masyarakat. Komponen-komponen tersebut menghasilkan etika, estetika dan budi pekerti (Sumantri, Setiawan,

	2019). Sehingga kemanusiaan dalam jati diri bangsa mencakup seluruh elemen yang ada pada level terbawah, seperti kekeluargaan hingga level tertinggi yakni kehidupan berbangsa dan bernegara.
--	---

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan rasa wawasan karsa kebangsaan Indonesia Raya! 2. Jelaskan pengertian jati diri bangsa! 3. Jelaskan jati diri bangsa Indonesia! 4. Jelaskan sumber jati diri bangsa Indonesia!

MODUL 04

PENERAPAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA



2 JP (90 menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini dibahas materi tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi Jiwa Jati diri bangsa Indonesia dan makna sila-sila dalam Pancasila.

Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.



KOMPETENSI DASAR

1. Dapat memahami penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Indikator Hasil Belajar:


- a. Menjelaskan jiwa jati diri bangsa Indonesia;
- b. Menjelaskan makna sila-sila dalam Pancasila.


2. Dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.


Indikator Hasil Belajar:

- a. Melakukan kegiatan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai umat beragama;
- c. Menunjukkan perilaku bersahabat, toleransi dan saling mengasihi sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan;
- d. Menunjukkan perilaku peduli, iba dan empati dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. Menunjukkan perilaku gotong royong dan persaudaraan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat;
- f. Menunjukkan perilaku musyawarah dan mufakat;
- g. Menunjukkan perilaku adil dan bijak dalam bermasyarakat.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan: Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>Sub Pokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jiwa jati diri bangsa Indonesia; 2. Makna sila- sila dalam Pancasila.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Metode <i>brainstroming</i> (curah pendapat) Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan. 3. Metode tanya jawab Metode ini digunakan pendidik untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode diskusi Metode ini digunakan oleh pendidik untuk menugaskan peserta didik mendiskusikan suatu persoalan atau masalah yang diberikan oleh pendidik. 5. Metode praktik / drill Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik membuat kegiatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 6. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>White board.</i> b. <i>Laptop/komputer.</i> c. <i>Papan flipchart.</i> d. <i>OHP/LCD.</i> e. <i>Laserpoint,</i> f. <i>Pengeras suara/Sound System.</i> 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Kertas Flipchart.</i> b. <i>Alat tulis.</i> 3. Sumber belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/576/III/2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pelatihan Pra Bintara Noken Polri dalam Penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2020; b. Haryo Sumantri dan Edi Setiawan. 2019. "<i>Jati Diri Bangsa, Kyai Muchammad Muchtar Mu'thi Sang Mujadid Wawasan Kebangsaan</i>". Jakarta: Orshid; c. Langgeng Purnomo.2020."Draf Buku Kado Untuk Bangsa Indonesia". Jakarta.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Awal : 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik melakukan <i>overview</i> (penyampaian materi kembali secara singkat) materi sebelumnya. b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Tahap Inti : 70 Menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting,

	<p>bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya/berkomentar terkait mata pelajaran yang diberikan. d. Peserta didik bertanya tentang materi yang belum dimengerti/dipahami; e. Pendidik menugaskan peserta didik untuk mendiskusikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; f. Peserta didik melaksanakan diskusi untuk membuat kegiatan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; g. Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik. <p>3. Tahap akhir: 10 Menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum terkait dengan kegiatan pembelajaran. b. Cek penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.
--	---

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan hasil penugasan tentang kegiatan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

	LEMBAR KEGIATAN
	Pendidik menugaskan peserta didik membuat tulisan tentang apa yang telah peserta didik lakukan, lihat dan rasakan sehari-hari dalam hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila (minimal 1 lembar kertas folio).

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">PENERAPAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA</p> <p>Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara, sebagaimana penjelasan pada Hanjar sebelumnya. Perlu dipahami dan diresapi dalam jiwa kita bahwa: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa itu sila pertama; (2) Ketuhanan Yang Maha Esa itu sila utama; (3) Ketuhanan Yang Maha Esa itu sila konsensus; (4) Ketuhanan Yang Maha Esa itu sila sudah final.</p> <p>Berdasarkan bunyi Pasal 29 UUD 1945 adalah ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.</p> <p>Dalam implementasi kehidupan sehari-hari perlu dipahami prinsip sehat dan harmonis dalam menjalankan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Sehat berarti setiap individu warga negara Indonesia wajib menjalankan prinsip agamanya masing-masing dengan benar sebagai wujud realisasi cinta sejati (bukan cinta palsu) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Buah dari beragama yang benar maka akan mewujudkan keimanan yang kuat. Harmonis berarti kerukunan antar umat beragama, bukan kerukunan beragama. Kerukunan antar umat beragama mengandung 3 unsur penting yaitu (1) Kesiediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain; (2) Kesiediaan memberikan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini; dan (3) Kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kesahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya.</p> <p>1. Jiwa Jati Diri Bangsa Indonesia (Sila ke-1 dan ke-2)</p> <p>Sebagaimana telah disampaikan pada materi pelajaran sebelumnya bahwa jiwa jati diri bangsa Indonesia terletak pada sila ke 1 dan sila ke 2. Sila pertama, <i>Ketuhanan yang Maha Esa</i>. Membicarakan masalah keimanan. Sila kedua <i>kemanusiaan yang adil dan beradab</i>. Dari dua sila tersebut, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, maka di situlah timbul rasa adil dan beradab. Akan tetapi jika keduanya tidak manunggal antara keimanan dan kemanusiaan, timbul kedzoliman, kemanusiaan yang runtuh dan</p>

	<p>kebiadaban.</p> <p>Keberadaan sila ke-1 dan sila ke-2 bukan berarti mendorong adanya potensi Dwi Sila. Akan tetapi seperti dalam paragraf sebelumnya sudah disebutkan jika dua sila tersebut adalah letak jiwanya jati diri bangsa. Apabila jati diri bangsa sudah masuk ke dalam jiwa kita, maka secara otomatis perilaku kita sesuai dengan yang terkandung di dalam nilai-nilai ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 yakni: Ketuhanan Yang Maha Esa dengan wujud beribadah dan kekuatan transenden, Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>2. Makna Sila-Sila dalam Pancasila</p> <p>a. Makna Sila Pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta manusia dan alam semesta; 2) Pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminasi antar umat beragama; 3) Saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. <p>b. Makna Sila Kedua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kemanusiaan yang adil dan beradab didasari oleh rasa cinta kepada sang Pencipta yang juga telah memberikan cintanya kepada manusia; 2) Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia; 3) Saling mencintai sesama manusia; 4) Mengembangkan sikap tenggang rasa; 5) Tidak semena-mena terhadap orang lain. <p>c. Makna Sila Ketiga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia;
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara 3) Cinta tanah air dan bangsa 4) Bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia 5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber Bhinneka Tunggal Ika <p>d. Makna Sila Keempat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; 2) Tidak memaksakan kehendak orang lain; 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan, itikad baik dan tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; 5) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur; 6) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. <p>e. Makna Sila Kelima</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan nilai-nilai luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta kegotongroyongan; 2) Bersikap adil (tidak pilih kasih, adil untuk kehidupan yang layak, tidak diskriminatif); 3) Menghormati hak-hak dan suka memberi pertolongan pada orang lain; 4) Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain; 5) Tidak bersikap boros, tidak bergaya hidup mewah; 6) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
--	---



RANGKUMAN

1. Keimanan adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya Nabi, berbuat baik, dan segala perbuatan keimanan (mencakup segala hal dan wujud dari menjalankan kehidupan beragama dan keyakinan yang benar, bukti rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa/bukan cinta palsu) sehingga taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku yang muncul merupakan perwujudan keimanan yang kuat.
2. Pada sila pertama, *Ketuhanan yang Maha Esa*. Membicarakan masalah keimanan. Sila kedua *kemanusiaan yang adil dan beradab*. Dari dua sila tersebut, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, maka di situlah timbul rasa adil dan beradab. Akan tetapi jika keduanya tidak manunggal antara keimanan dan kemanusiaan, timbul kezoliman, kemanusiaan yang runtuh dan kebiadaban.
3. Makna sila pada Pancasila yaitu:
 - a. Kebebasan bagi setiap insan Indonesia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
 - b. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia dengan berlaku adil, toleran, tenggang rasa dan cinta sesama;
 - c. Mengakui dan menghormati sepenuhnya terhadap keanekaragaman serta bangga sebagai bangsa Indonesia;
 - d. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan tanpa memaksakan kehendak;
 - e. Bersikap adil dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.



LATIHAN

1. Jelaskan jiwa jati diri bangsa Indonesia!
2. Jelaskan makna sila-sila dalam Pancasila!